

IMPLEMENTASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KELUARGA BERENCANA

Irwanto¹, Meyzi Heriyanto² dan Febri Yuliani³

¹Prodi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
email: iwan_aan@yahoo.com

Abstract

This research aims to determine the effect of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure in the implementation of Communication, Information and Education of Family Planning, both simultaneously and partially on the participation of fertile age couples (PUS) KB Long-Term Contraception Method (MKJP) in the City. Pekanbaru. This research type is a quantitative approach with survey methods and quantitative / statistical data analysis. Primary data collection through questionnaires to 35 respondents to the City Family Planning Extension Officer. Pekanbaru and secondary data through other data relating to the problem under study. The analysis method uses descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis with the help of the SPSS application. The results showed that simultaneously the variables of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure had a significant effect on the Participation of Fertile Age Couples in the Long-Term Contraception Method with a calculated f value (6.129) > f table (2.69) and the contribution of the coefficient of determination (R^2) of 75.0%. With the remaining 25.0% influenced by other variables not examined in this research.

Keywords: Implementation, policies, participation, family planning

1. Pendahuluan:

Situasi kependudukan di Indonesia saat ini tidak lepas dalam persoalan, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, komposisi penduduk dan kualitas penduduk serta kesejahteraan penduduk yang rendah. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru juga mengalami masalah Kependudukan yang sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Angka pertumbuhan penduduk selalu naik secara signifikan dari tahun ke tahun dan angka TFR (Total Fertility Rate) atau angka kelahiran yang masih diatas target Nasional yaitu total 2,1 per wanita usia subur.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Pekanbaru berjumlah 897.768 dan pada tahun 2019 berjumlah 1.143.359, terjadi kenaikan sebesar 245.591 jiwa penduduk dalam rentang waktu 10 tahun (± 245.591 jiwa) dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan terbanyak dari kelompok

umur 10 – 49 tahun atau kelompok umur Wanita Usia Subur/WUS (BKKBN, 2014) sebesar 378.922 atau 68% dari jumlah penduduk perempuan yang ada. Ini menunjukkan bahwa potensi kelahiran/fertilitas di Kota Pekanbaru diwaktu mendatang akan terus meningkat. Data juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru paling banyak dari kelompok umur 15 – 19 tahun sampai dengan kelompok umur 60 – 64 tahun yaitu sebesar 805.642 jiwa atau 70,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Pekanbaru saat ini. Data ini menjelaskan bahwa Pekanbaru sudah memasuki era bonus demografi, yaitu menurunnya rasio jumlah penduduk non produktif (usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas) terhadap jumlah penduduk produktif ; umur 15 – 64 tahun (BKKBN, 2014). Melimpahnya penduduk usia produktif ini merupakan kesempatan sekaligus tantangan, karena membawa keuntungan dalam modal pembangunan jumlah angkatan kerja dan tantangan bagaimana bila kualitas penduduk produktif

tersebut rendah dari aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Menyikapi kondisi tersebut, maka ini harus menjadi perhatian bersama, bagaimana angka kelahiran (TFR) di Kota Pekanbaru dapat diturunkan dengan meningkatkan angka partisipasi PUS ber KB, terutama partisipasi pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sehingga kondisi bonus demografi di Kota Pekanbaru bisa semakin lama berlangsung dan laju pertumbuhan penduduk tidak membawa pada situasi lonjakan penduduk yang tinggi dimasa mendatang.

Program KB adalah kebijakan yang dicanangkan untuk mengatasi masalah ledakan penduduk, menekan laju pertumbuhan penduduk dengan pengendalian kelahiran. Program KB merupakan upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas, yang menawarkan manfaat kepada keluarga dalam merencanakan dan mengatur usia ideal melahirkan dan berhenti kehamilan atau melahirkan, mengatur jarak kehamilan berikutnya dan menentukan jumlah anak yang di inginkan. Keberhasilan program KB jangka panjang akan membawa manfaat pada pembangunan sektor lain, mengurangi beban pemenuhan kebutuhan penduduk yang ada, yang pada akhirnya menghantarkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik di masa mendatang.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang menuangkan mengenai percepatan pengendalian fertilitas melalui penggunaan kontrasepsi, maka Program KB Nasional harus lebih diarahkan kepada pemakaian MKJP, dalam hal ini KB yang dimaksud adalah penggunaan/pemakaian alat kontrasepsi seperti IUD (intrauterine device), Implan, Tubektomi / Medis Operasi Wanita (MOW), dan Vasektomi / Medis Operasi Pria (MOP) oleh PUS.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekanbaru, angka total peserta KB tahun 2019 hanya 57,9 % dari jumlah PUS yang ada. Dimana partisipasi PUS pada KB MKJP hanya 17,4% dari PUS atau 29,9% dari jumlah peserta KB. Melihat masih cukup tingginya angka TFR dan rendahnya partisipasi PUS ber KB terutama terhadap MKJP seperti data diatas, maka PUS sebagai variabel yang mempengaruhi fertilitas/kelahiran harus menjadi fokus utama agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang Program KB.

Implementasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dalam segala bentuk kegiatan harus terus gencar dan intensif dilakukan agar meningkat partisipasi PUS (suami atau istri), baik dalam bentuk partisipasi langsung menjadi peserta KB MKJP maupun partisipasi tidak langsung seperti partisipasi pada kegiatan KIE KB atau kelompok-kelompok kegiatan KB dalam rangka memenuhi hak/kebutuhan informasi terhadap kesehatan reproduksi; mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak serta menghentikan kehamilan pada usia resiko hamil, informasi kesehatan ibu dan anak serta informasi mengenai Kependudukan dan KB lainnya.

Sebagai strategi utama dalam upaya pencapaian program KB, KIE KB menjadi keharusan untuk terus menerus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak (mitra). KIE KB harus mampu menjangkau wilayah-wilayah, kelompok umur dan status PUS tertentu, baik melalui petugas PKB, tenaga kesehatan (dokter/bidan/perawat), kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan), tokoh agama/tokoh masyarakat dan mitra kerja lainnya.

Dari penjelasan diatas, maka pada level pelaksana Program KB, komunikasi dan kordinasi para pihak pelaksana KIE KB menjadi sangat penting untuk berjalan dengan baik. Komunikasi antar pihak pelaksana harus saling mendukung dan bersinergi. Transmisi komunikasi dan informasi, kejelasan dan konsistensi komunikasi antar lembaga dan antar petugas pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan KIE KB bila ditinjau dari aspek sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia (SDM), kewenangan, informasi, fasilitas dan anggaran/financial saat ini tentu masih dapat catatan-catatan yang harus dibenahi di masa mendatang. Bagaimana kecukupan jumlah dan kualitas SDM pelaksana KIE KB baik dari petugas Penyuluh KB, mitra kerja dan unsur masyarakat lainnya, anggaran pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan fasilitas sarana prasarana seperti ketersediaan balai penyuluhan, KIE Kit dan lainnya tentu sumber daya – sumber daya tersebut menjadi variabel yang memberi pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan tujuan KIE KB itu sendiri. Jika keterbatasan sumber daya tersebut tidak diatasi, maka pelaksanaan kebijakan program KB tidak akan berjalan efektif dan berdampak kepada tercapainya tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agustino (2006:152) “ Jika sumber daya memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program maka

akan berdampak terhadap perolehan hasil yang kurang maksimal”.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan pada struktur birokrasi dan tata laksana dibidang pengendalian penduduk dan KB. Perubahan kebijakan tersebut membawa implikasi pada perubahan tata laksana implementasi kebijakan dilapangan. Untuk itu sistem dan prosedur kerja (SOP) mesti menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Fragmentasi kewewangan, tugas dan fungsi yang tersebar antar pihak pelaksana program KB harus mampu berjalan secara koordinatif dan sistematis. Untuk itu disposisi/sikap komitmen dari masing-masing pihak harus terbangun dan konkrit wujudnya dilapangan sehingga peningkatan partisipasi PUS pada KB MKJP melalui kebijakan Advokasi KIE KB dapat tercapai.

Ditinjau dari sisi masyarakat atau PUS sebagai sasaran kebijakan KB MKJP mesti diberikan informasi yang benar dan terpercaya. Pelayanan publik kepada masyarakat melalui KIE KB tidak hanya dipandang dalam rangka meningkatkan partisipasi ber KB dan penurunan angka kelahiran, tetapi juga merupakan bentuk Pemerintah melakukan kewajiban melayani kebutuhan informasi Kependudukan dan KB kepada masyarakat. Menurut Winarno (2012), implementasi kebijakan memiliki porsi 60 persen, itu artinya bahwa implementasi adalah tahapan yang paling sulit dibandingkan tahapan lainnya. Menurut Edward (Winarno, 2012), terdapat empat variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Jika implementasi telah dilakukan dengan baik maka tujuan dari suatu program biasanya akan tercapai, begitupun sebaliknya jika implementasi tidak dilakukan dengan baik maka akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Melihat penjelasan diatas, maka perlu dilakukan penelitian melakukan analisis pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam implementasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana (KB) terhadap partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Berdasarkan permasalahan penelitian dan penjabaran teori yang mendasarinya maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

1. Adanya pengaruh komunikasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
2. Adanya pengaruh sumber daya dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
3. Adanya pengaruh disposisi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
4. Adanya pengaruh struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
5. Adanya pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.

Berdasarkan hipotesis tersebut penelitian ini bertujuan adalah untuk menganalisis pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi baik secara parsial dan simultan dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi Pasangan Usia Subur KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota. Pekanbaru.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kuantitatif. Populasi penelitian yaitu petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kota. Pekanbaru yang berjumlah 35 orang. Sampel penulis ambil keseluruhan, yaitu 35 orang responden berdasarkan teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik yang diambil yaitu sampling jenuh (sensus). Teknik pengumpulan data adalah kuesioner. Analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengelolaan data dilakukan dengan teknik statistik yaitu statistik deskriptif digunakan untuk tabel frekuensi, persentase, skor dan rata-rata. Sedangkan untuk statistik inferensial digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS versi 24

3. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai komunikasi berada pada kategori cukup. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat baik sebanyak 3 responden (8%), baik sebanyak 8 responden (22%), menyatakan cukup sebanyak 18 responden (53%), menyatakan tidak baik sebanyak 6 responden (17%), dan hasil rata-rata tidak ada responden menyatakan sangat tidak baik. Sehingga total skor variabel komunikasi masuk kategori penilaian “cukup“. Dengan hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa indikator-indikator komunikasi yang digunakan untuk mengukur komunikasi dalam implementasi KIE KB meliputi transmisi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi mempunyai nilai cukup atau belum berlangsung secara optimal. Agar komunikasi dalam implementasi KIE KB efektif meningkatkan partisipasi PUS KB MKJP, maka butir-butir yang bernilai cukup masih perlu ditingkatkan.

Melalui analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai sumber daya berada pada kategori cukup. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat baik sebanyak 3 responden (10%), menyatakan baik sebanyak 9 responden (26%), menyatakan cukup sebanyak 17 responden (49%) dan menyatakan tidak baik sebanyak 5 responden (15%) dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak baik. Sehingga total skor variabel sumber daya masuk kategori penilaian “cukup“. Dengan hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sumber daya mempunyai nilai cukup, sehingga belum optimal mendukung keberhasilan implementasi KIE KB dalam peningkatan partisipasi PUS KB MKJP. Agar partisipasi PUS pada KB MKJP meningkat, maka perlu peningkatan ketersediaan dan kelayakan sumber daya yaitu staf, penyediaan data yang relevan, penguatan wewenang implementator KIE KB (khususnya PKB) serta tersedianya sumber daya anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KIE KB.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai disposisi/sikap/kecenderungan berada pada kategori cukup. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat baik sebanyak 1 responden (2%), menyatakan baik sebanyak 10

responden (29%), menyatakan cukup sebanyak 21 responden (59%), menyatakan tidak baik sebanyak 3 responden (10%), dan hasil rata-rata tidak ada responden menjawab sangat tidak baik. Sehingga total skor variabel disposisi masuk kategori penilaian “cukup“. Hasil nilai ini dapat diartikan disposisi para pihak pelaksana KIE KB menjalankan kebijakan hanya secara normatif rutinitas tugas atau karena normatif kemitraan yang sudah disepakati lembaga/organisasi. Hal ini salah satunya bisa dikarenakan tidak adanya imbalan/insentif atau masih belum layaknya insentif yang diterima selama ini, yang berakibat rendahnya motivasi dan sikap untuk berperan aktif dalam implementasi KIE KB.

Melalui analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai struktur birokrasi berada pada kategori cukup. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat baik sebanyak 1 responden (5%), menyatakan baik sebanyak 10 responden (28%), menyatakan cukup sebanyak 20 responden (57%) dan menyatakan tidak baik sebanyak 4 responden (10%) dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak baik. Sehingga total skor variabel struktur birokrasi masuk kategori penilaian “cukup“. Dengan hasil ini dapat diuraikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel struktur birokrasi yaitu sistem operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi menunjukkan hasil cukup dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai partisipasi PUS KB MKJP berada pada kategori cukup. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat baik sebanyak 2 responden (6%), menyatakan baik sebanyak 7 responden (21%), menyatakan cukup sebanyak 24 responden (68%), menyatakan tidak baik sebanyak 2 responden (5%), dan hasil rata-rata tidak ada responden menjawab sangat tidak baik. Sehingga total skor variabel partisipasi PUS KB MKJP masuk kategori penilaian “cukup“. Dengan hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi PUS KB MKJP mempunyai nilai cukup, sehingga belum optimal meningkatkan angka peserta KB MKJP (peserta KB Baru dan peserta KB Aktif) di Kota. Pekanbaru.

B. Analisis Statistik Inferensial

Hasil analisis pengujian hipotesis baik secara parsial dan simultan dengan menggunakan program SPSS Versi 24, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| 1 | .871 ^a | .750 | .676 | 2.018 |

a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

b. Dependent Variable: Partisipasi PUS KB MKJP

Tabel 2. ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|---------|----------------|----|-------------|------|-------------------|
| 1 Regre | 8.076 | 4 | 2.019 | 6.12 | .001 ^b |
| Resid | 9.883 | 3 | .329 | | |
| Total | 17.95 | 3 | | | |

a. Dependent Variable: Partisipasi PUS KB MKJP

b. Predictors: (Constant), Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Tabel 3. Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.38 | 1.016 | | 1.36 | .183 |
| | Komuni | .188 | .086 | .307 | 2.83 | .037 |
| | Sumber | .560 | .147 | .573 | 4.82 | .001 |
| | Disposi | .149 | .160 | .140 | 3.93 | .031 |
| | Birokra | .091 | .155 | .083 | 2.58 | .026 |

a. Dependent Variable: Partisipasi PUS KB MKJP

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 2 sisi. Tabel distribusi t dicari pada tabel statistik pada signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan

derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $35-4-1 = 30$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel bebas). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi 0,025) maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,042. Kriteria pengujian : jika t hitung \leq t tabel atau $-t$ hitung $\geq -t$ tabel maka H₀ diterima dan jika t hitung $>$ t tabel atau $-t$ hitung $<$ -t tabel maka H₀ ditolak. Berdasarkan signifikansi : jika signifikansi $>$ 0,05 maka H₀ diterima dan jika signifikansi \leq 0,05 maka H₀ ditolak.

Hasil uji secara parsial/uji t pengaruh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap variabel partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Komunikasi dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh t-hitung sebesar 2,838. Maka bila dibandingkan pada t-tabel pada signifikan $< \alpha = 5\%$, yakni sebesar 2,042 dapat dilihat bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,838 > 2,042).
2. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel sumber daya diperoleh t-hitung sebesar 4,828 dengan perbandingan t-tabel sebesar 2,042, dapat terlihat bahwa t-hitung > t-tabel (4,828 > 2,042).
3. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel disposisi dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh t-hitung sebesar 3,931. Maka bila dibandingkan pada t-tabel pada signifikan $< \alpha = 5\%$, yakni sebesar 2,042 dapat dilihat bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel (3,931 > 2,042).
4. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel birokrasi dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh t-hitung sebesar 2,589. Maka bila dibandingkan pada t-tabel pada signifikan $< \alpha = 5\%$, yakni sebesar 2,042 dapat dilihat bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,589 > 2,042).

Hasil uji f pengaruh secara simultan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel output ANOVA maka hasil regresi linier berganda yaitu menunjukkan bahwa diperoleh f hitung sebesar 6,129. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, f tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0,05, $df_1 = k-1$ (jumlah variabel-1) atau $3-1 = 2$ dan $df_2 = n-$

$k-1$ atau $35-4-1 = 30$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel bebas) maka hasil diperoleh untuk f tabel sebesar 2,69. Kriteria pengujian : jika f hitung $\leq f$ tabel atau maka H_0 diterima dan jika f hitung $> f$ tabel atau maka H_0 ditolak. Berdasarkan signifikansi : jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan jika signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak.

Berdasarkan output ANOVA diperoleh bahwa hasil variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang dengan nilai f hitung (6,129) $> f$ tabel (2,69) atau dengan nilai sig sebesar (0,001) lebih kecil dari (0,05) maka H_0 ditolak. Dengan demikian secara bersama-sama komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB berpengaruh signifikansi terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang di Kota. Pekanbaru

Berdasarkan tabel Model Summary diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) atau Adjusted R Square sebesar 0,750 atau 75,0%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi) terhadap variabel terikat Partisipasi Pasangan Usia Subur KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota. Pekanbaru sebesar 75,0%. Sedangkan sisanya sebesar 25,0% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Nilai standard Error of The Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y .

Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam Implementasi KIE KB sudah cukup berhasil memberi pengaruh terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota Pekanbaru, karena secara kuantitatif faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut mempunyai penilaian minimal cukup pada pada setiap indikatornya (Ridwan dan Akdon, 2013). Penilaian minimal cukup tersebut diperoleh dari nilai skala interval rata-rata pada setiap jawaban responden pada setiap item kuesioner. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penilaian pada tingkat cukup ini baru menunjukkan suatu kondisi adanya suatu dukungan pada tahap minimal terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan belum menunjukkan tingkat kondisi yang memuaskan, sehingga terhadap kondisi ini tetap masih perlu upaya-upaya peningkatan.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif data jawaban kuesioner responden diketahui variabel

komunikasi mendapatkan total skor masuk kategori penilaian “cukup”. Sedangkan dari analisis statistik inferensial, diketahui bahwa Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi PUS pada KB MKJP. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t -tabel yaitu $2,838 > 2.042$ dan Sig. $0,037 < 0,05$, dengan besaran pengaruh pada tabel coefficients sebesar 18,8%. Artinya terjadi proses komunikasi dari pembuat kebijakan (jenjang hirarki organisasi) sampai dengan pihak pelaksana kebijakan/implementator, komunikasi antar para pihak pelaksana dan komunikasi para pihak pelaksana KIE KB kepada PUS atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dengan demikian secara parsial variabel Komunikasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi PUS KB MKJP, dimana setiap peningkatan variabel komunikasi akan diikuti peningkatan variabel Partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru. Sebagai pelaksana kebijakan/implementator, informasi-informasi mesti diketahui dan difahami dengan baik karena merupakan salah satu persyaratan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ini sesuai pendapat Edwards, sebagaimana dikutip oleh (Winarno, 2012), yang menyatakan persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. George Edward III (Winarno, 2012) mengatakan, Komunikasi merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Selain pelaksana kebijakan, yang menjadi sasaran kebijakan juga harus di informasikan mengenai maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Faktor sumber-sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan KIE KB. Dengan demikian, setiap upaya peningkatan faktor sumber-sumber akan memiliki dampak yang lebih besar dalam mendukung keberhasilan implementasi KIE KB. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui variabel sumber daya dalam penelitian ini mendapat total skor dengan kategori penilaian “ cukup”. Sedangkan dari analisis statistik inferensial, diketahui bahwa variabel sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi PUS pada KB MKJP. Hal

ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t -tabel yaitu $4,828 > 2,042$ dan $\text{Sig. } 0,001 < 0,05$, dengan besaran pengaruh pada tabel coefficients sebesar 56,0%. Ini memberi arti bahwa dengan semakin baiknya ketersediaan sumber daya – sumber daya KIE KB maka akan memberikan dampak pada meningkatnya Partisipasi PUS peserta KB MKJP di Kota. Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward (Winarno, 2012), keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan juga oleh adanya tanggung jawab dan kepatuhan para pihak pelaksana kebijakan. Jika sikap para pelaksana kebijakan tersebut enggan dan menolak, maka sikap ini akan menghambat implementasi KIE KB. Ini sesuai pendapat Edwards, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2012), kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, maka hal ini berarti adanya dukungan besar para pihak pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan para pembuat keputusan. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui variabel disposisi dalam penelitian ini mendapat total skor dengan kategori penilaian “cukup”. Sedangkan dari analisis statistik inferensial, diketahui bahwa variabel disposisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi PUS pada KB MKJP dengan besaran pengaruh pada tabel coefficients sebesar 14,9%. Hal ini memberi arti bahwa semakin baiknya disposisi/sikap/kecenderungan-kecenderungan lembaga dan para petugas/personil implementator KIE KB akan memberikan dampak atau berpengaruh nyata dalam meningkatkan PUS peserta KB MKJP di Kota. Pekanbaru. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Diani Sormin (2014), Menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara Disposisi terhadap Partisipasi KB MOP di Kota. Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui variabel Struktur Birokrasi dalam penelitian ini mendapat total skor masuk pada kategori penilaian “cukup”. Sedangkan dari analisis statistik inferensial, diketahui bahwa variabel disposisi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi PUS pada KB MKJP dengan besaran pengaruh pada tabel coefficients sebesar

9,1%. Dimana setiap peningkatan variabel struktur birokrasi maka akan diikuti peningkatan variabel Partisipasi PUS pada KB MKJP di Kota. Pekanbaru. Hal ini memberi arti bahwa semakin baiknya unsur struktur organisasi dan kemitraan antar lembaga dan para pihak pelaksana / implementator KIE KB akan memberikan dampak atau berpengaruh nyata dalam meningkatkan PUS peserta KB MKJP di Kota. Pekanbaru.

Hasil regresi berganda komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang secara simultan menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,750 atau 75,0%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) secara simultan terhadap variabel terikat (partisipasi pasangan usia subur pada metode kontrasepsi jangka panjang) di Kota. Pekanbaru sebesar 75,0%. Sedangkan sisanya sebesar 25,0% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya semakin baik dan tinggi kualitas dan intensitas komunikasi informasi antar pihak pelaksana KIE, semakin tersedia dan layaknya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan, semakin baiknya komitmen lembaga dan sikap petugas para pihak pelaksana KIE KB serta semakin baiknya ketersediaan dan kejelasan sistem operasional prosedur kerja untuk difahami dan dilaksanakan oleh semua pihak pelaksana kebijakan dengan struktur birokrasi yang efektif dan bersinergi akan memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas pelaksanaan KIE KB dan meningkatkan partisipasi pasangan usia subur pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Begitu juga sebaliknya, bila semakin rendah kualitas dan intensitas komunikasi antar pihak pelaksana, semakin rendahnya ketersediaan dan kelayakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki, semakin buruknya komitmen antar lembaga dan sikap petugas pelaksana, serta semakin rendahnya pemahaman dan kepatuhan dalam pelaksanaan SOP oleh para pihak pelaksana dengan struktur birokrasi yang tidak efektif dan tidak bersinergi akan memberi pengaruh pada buruknya kualitas pelaksanaan KIE KB dan rendahnya partisipasi pasangan usia subur pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.

4. Kesimpulan

Secara parsial komunikasi berpengaruh secara signifikansi pada implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya semakin intens dan meningkat kualitas komunikasi akan semakin tinggi partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Berikutnya sumber daya, secara parsial berpengaruh secara signifikansi pada implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya semakin tersedia dan meningkatnya ketersediaan dan kelayakan sumberdaya dalam implementasi KIE KB maka akan semakin tinggi partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Kemudian secara parsial disposisi berpengaruh secara signifikansi pada Implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya semakin baik sikap, komitmen dan motivasi para pihak pelaksana implementasi KIE KB maka akan semakin tinggi partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Begitu juga dengan struktur birokrasi, berpengaruh signifikansi pada implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Artinya semakin baik sistem operasional prosedur untuk difahami dan dilaksanakan serta struktur birokrasi yang efektif akan semakin tinggi pula partisipasi pasangan usia subur pada metode kontrasepsi jangka panjang.

Berdasarkan uji f menunjukkan bahwa secara bersama-sama komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikansi terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang di Kota. Pekanbaru. Artinya semakin baik dan tinggi tingkat intensitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana KIE KB dan struktur birokrasi dan fragmentasi yang efektif maka akan meningkatkan partisipasi pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (penggunaan alat/cara kontrasepsi IUD, Implan, Tubektomi dan Vasektomi). Sebaliknya jika semakin rendah intensitas komunikasi, minimnya sumber daya, rendahnya komitmen, buruknya sikap dan motivasi implementator KIE KB serta tidak efektifnya Struktur Birokrasi dan fragmentasi kewenangan maka akan memberi pengaruh semakin rendahnya partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang. Persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur

birokrasi) terhadap variabel terikat partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang di Kota. Pekanbaru sebesar 75,0%. Sedangkan sisanya sebesar 25,0% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini..

5. Daftar Pustaka

- BKKBN dan UGM. 2013. Revolusi Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. Jakarta
- BKKBN, UNFPA. 2007. Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender dan Pembangunan Kependudukan. BKKBN. Jakarta
- BKKBN. 2015. Revolusi Advokasi dan KIE. BKKBN. Jakarta
- BKKBN. 2020. Rencana Strategis BKKBN 2020-2024. Jakarta. BKKBN
- BPS, 2010. Sensus Penduduk 2010. Jakarta. BPS.
- BPS, 2020. Kota. Pekanbaru Dalam Angka 2020. Jakarta. BPS
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Hartanto, Hanafi. 2004, Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Kemenkes, BKKBN dan BPS, 2018. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Jakarta. Kemenkes, BKKBN dan BPS
- Koes Irianto. 2014. Pelayanan Keluarga Berencana – Dua Anak Cukup. Alfabeta. Bandung
- Samodra, Wibawa. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Slamaet. Yulius, 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press. Surakarta
- Sormin, R. D Sormin. 2014 Pengaruh Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Terhadap Partisipasi KB MOP di Bandar Lampung, Bandar Lampung
- Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media. Malang
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. PT. Buku Seruw. Yogyakarta